

PENGARUH BUDAYA POLITIK PANCASILA TERHADAP KONSOLIDASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Eva Rachmawati, Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Alamat e-mail : rachmawatieva1@gmail.com, sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstract

The Pancasila Democratic System (SDP) is a democratic system based on Pancasila values, which developed from the traditions of family and deliberation in Indonesian society. This democracy survived under feudalism because land, as the main factor of production, was jointly owned by village communities. The custom of deliberation brings the habit of making decisions through consensus. This political system influences each region's culture, the way bureaucracy is implemented, and democratic institutions, reflecting local political culture and important aspects of bureaucracy.

Keywords : Democracy, Pancasila, Deliberation, Society

Abstrak

Sistem Demokrasi Pancasila (SDP) merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang berkembang dari tradisi kekeluargaan dan musyawarah dalam masyarakat Nusantara. Demokrasi ini bertahan di bawah feodalisme karena tanah, sebagai faktor produksi utama, dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Adat bermusyawarah membawa kebiasaan pengambilan keputusan melalui mufakat. Sistem politik ini mempengaruhi budaya setiap daerah, cara pelaksanaan birokrasi, dan lembaga demokrasi, mencerminkan budaya politik lokal

Kata Kunci : Demokrasi, Pancasila, Musyawarah, Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Sistem Demokrasi Pancasila (SDP) merupakan sistem demokrasi yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang berkembang dari paham kekeluargaan yang dianut oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Demokrasi asli Nusantara dapat bertahan dibawah feodalisme,--menurut Hatta--, karna banyak tempat di Nusantara, tanah yang merupakan faktor produksi yang terpenting, tidak sepenuhnya dimiliki raja, melainkan dimiliki Bersama oleh Masyarakat desa (adat). Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah terhadap berbagai hal yang menyangkut kepentingan Bersama untuk diputuskan secara mufakat (bersepakat).

Suatu sistem politik juga mempengaruhi budaya masing-masing daerah yang pada gilirannya mempengaruhi cara pelaksanaan birokrasi dan Lembaga demokrasi. Lembaga-lembaga demokrasi local mencerminkan budaya politik suatu daerah, dan birokrasi mencerminkan aspek-aspek terpentingnya, karena mempengaruhi seluruh bidang kehidupan politik suatu Masyarakat. Budaya demokrasi mempunyai hubungan yang kuat dengan budaya politik local. Sebab, pertama, birokrasi adalah sistem politik. Kedua, budaya demokrasi berperan penting dalam Upaya memahami elit politik. Ketiga, keberhasilan Pembangunan daerah dipengaruhi oleh peran birokrasi daerah yang diperkenalkan.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi pancasila, Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai konsolidasi demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Budaya Politik Pcasila didasarkan pada lima prinsip inti yaitu ketuhanan, kemanusiaan yang

beradab, persatuan Indonesia, proses demokrasi yang kebijaksanaan dan inklusivitas; hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh anhggota masyarakat indonesia.

Demokrasi dipandang sebagai bagian dari scenario besar yang ditawarkan kepada dunia. Ada yang berpendapat bahwa Masyarakat barat yang melahirkan demokrasi mempunyai budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia. Hal ini menjadi alas an yang digunakan oleh Masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan perlembangan demokrasi di Indonesia. Memang beanr budaya mempengaruhi pelaksanaan demokrasi, tapi demokrasi bisa dikembangkan dalam budaya apa pun. Faktanya, demokrasi tidak lagi sama persis dalam konteks budaya yang berbeda.

Ilmuwan politik yang memiliki banyak permasalahan dengan demokrasi modern, percaya bahwa pendiidkan kewarganegaraan sangat penting dalam proses demokrasi. Dahl berpendapat bahwa salah satu kriteria utama proses demokrasi adalah pemahaman yang jelas. Semua warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama relevan dan konsekuensinya dalam jangka waktu yang wajar. Mencermati kebangkitan populisme politik dalam konteks konsolidasi demokrasi hal ini tidak hanya terjadi diluar negri, namun juga terjadi dinegara kita, Indonesia. Di beberapa daerah, Masyarakat yang dianggap minoritas mengalami diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan gaya politik. Disatu sisi politik populisme tampil membangkitkan semangat Masyarakat yang tertindas atau tertindas oleh kediktatoran orde baru, gaya politik saat ini terkesan terobsesi pada suara mayoritas sekaligus berpihak pada penindasan terhadap kelompok minoritas dalam Sebagian besar kasus, mayoritas suara cenderung mendukung status quo. Padahal konsolidasi demokrasi bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya melemahkan kekuasaan absolut masing-masing kelompok melalui model pembagian kekuasaan.

Dalam konteks konsolidasi demokrasi, budaya politik Pancasila sangat berpengaruh. Pertama, nilai Pancasila mengedapankan partisipasi politik yang inklusif. Kedua, membantu mengatasi ketegangan dan keberagaman politik di Indonesia. Ketiga, berperan penting dalam memperkuat Lembaga demokrasi. Masyarakat Indonesia cenderung mendukung demokrasi dan menjaga stabilitas demokrasi meskipun ada tantangan dan relasi kekuasaan yang muncul. Semakin kompleksnya politik demokrasi di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul “ PENGARUH BUDAYA POLITIK PANCASILA TERHADAP KONSOLIDASI DEMOKRASI DI INDONESIA”.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur, dan pendekatan studi perbandingan.

1. Menurut Danial dan Warsiah (2009), studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
2. Metode studi perbandingan digunakan dengan maksud untuk membandingkan pendapat atau teori yang ditambah dengan masalah yang timbul dalam praktek.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh Masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, Lembaga Masyarakat maupun perseorangan. Pancasila menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara, lewat nilai, moral, norma, dan etika yang ditanamkan sebagai bagian dari landasan filosofis serta kepribadian bangsa dan negara. Budaya politik (*political culture*) hampir bsia dipastikan adalah aspek reformasi politik yang

tidak berkembang signifikan sepanjang masa transisi dan konsolidasi demokrasi Indonesia selama dua dasawarsa terakhir.

Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuatan mayoritas (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020), karena setiap golongan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada golongan lain. Demokrasi Pancasila bukan terletak pada seseorang yang berpengaruh terhadap orang banyak yang dapat mengambil Keputusan berdasarkan kemauan sendiri (Alwan & Warsini, 2021).

Kesadaran demokrasi memberikan kesempatan pada seseorang untuk menyatakan pendapatnya dan boleh membuat Keputusan yang diinginkan didalam melaksanakan pendapatnya dan boleh membuat Keputusan yang diinginkan di dalam melaksanakan sesuatu naun Keputusan yang diambil harus mendapatkan persetujuan berdasarkan mufakat (Budiardjo, 2000). Nilai-nilai kebersamaan yang menjadi perekat orientasi kekeluargaan seperti itulah, yang mendasari beroperasinya mekanisme musyawarah mufakat, menjadi mekanisme utama penyelesaian berbagai masalah dalam Masyarakat dan di tradisikan dalam *Itudasi pulung* pada masyarakat. *Bale banjar* pada Masyarakat Bali atau pun *Bedugem* pada suku sasak di Lombok (Koesnoe, 1975).

Sekalipun demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang disinyalir oleh Latif (2019), hal ini merupakan fenomena baru di negeri ini yang muncul sebagai ikutan dari formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Namun demikian nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu ternyata telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti pemerintahan desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya.

Demokrasi yang telah dijalankan oleh suku-suku di Nusantara sejak dahulu hingga saat ini masih dapat dijumpai dalam praktik-praktik kehidupan kelompok-kelompok Masyarakat hukum adat, seperti desa, *kuria*, *marga*, *nagari*, dan *wanua*. Demokrasi yang mereka jalankan diorientasikan untuk memastikan terpeliharanya kesatuan dalam masyarakat, yang berpendirian : sama tinggi sama rendah, sama ke hulu sama ke hilir, serasa semalu sepenanggungan, serugi-selaba, ringan sama dijinjing berat sama dipikul, bukan tunggang menunggang tapi tolong menolong, bergotong royong (Hazairin, 1981).

Demokrasi tidak bisa membatasi siapapun untuk ikut dalam kontestasi politik akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa dinasti politik berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia seperti praktek manipulasi untuk memanfaatkan anggota keluarga yang dilakukan juga oleh bupati lebak Mulyadi jayabaya, dengan memanfaatkan jabatan untuk memenangkan anaknya Iti Octavia jayabaya, pilkada lebak tahun 2013.

1. Definisi Budaya Politik Pancasila dan Konsolidasi Demokras

Budaya politik pancasila adalah sistem nilai, sikap, dan perilaku politik yang didasarkan pada pancasila, yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Budaya politik ini mencerminkan keyakinan, norma, dan praktik yang dianut oleh warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan institusi politik. Budaya politik pancasila mengandung lima dasar yang termasuk dalam lima sila pancasila.

Nilai-nilai, sikap dan perilaku politik dalam pancasila dimasukkan kedalam budaya politik. Hal ini mencakup pentingnya saling menghormati keberagaman, wacana, dan kolaborasi adalah bagian penting dalam hal ini. Demokrasi dijadikan suatu sistem yang terlembaga melalui proses konsolidasi demokrasi, yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan lembaga politik. Budaya politik pancasila mengandung lima dasar yang termasuk dalam lima sila pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa :

- a. Menyiratkan penghargaan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia
- b. Menekankan pada toleransi dan kebebasan beragama, di mana setiap individu bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab :

- a. Pentingnya mengargai martabat manusia, keadilan sosial, dan kemanusiaan
- b. Perlindungan hak asasi manusia dan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.

3. Persatuan Indonesia :

- a. Mengdeapankan pentingnya kesatuan dan integritas nasional dalam keragaman budaya, etnis, dan agama.
- b. Solidaritas antarwarga negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

4. Kerakyatan yang Dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan :

- a. Menekan pada prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan
- b. Menghargai partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- a. Mendorong pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat
- b. Mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Definisi Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi adalah proses di mana demokrasi menjadi sistem politik yang mapan dan diterima secara luas oleh semua lapisan masyarakat serta institusi politik. Ini mencakup penguatan dan pemantapan institusi-institusi demokratis, serta internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Beberapa aspek penting dalam konsolidasi demokrasi meliputi:

1. Stabilitas Politik::

1. Mencapai stabilitas politik yang di mana konflik politik dapat dikelola secara damai dan teratur.
2. Mengurangi risiko kekacauan politik melalui mekanisme demokratis yang efektif.

2. Legitimasi Sistem Politik:

1. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintah yang berkuasa.
2. Membangun legitimasi melalui pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif serta penerimaan hasilnya oleh semua pihak.

3. Penguatan Institusi Demokrasi:

1. Mengembangkan dan memperkuat institusi-institusi demokratis seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga penegak hukum.
2. Memastikan bahwa institusi-institusi ini bekerja secara efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Partisipasi Publik:

1. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, termasuk melalui pemilu, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media.
2. Mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik.

5. Kepatuhan terhadap Aturan Hukum:

1. Menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang.
2. Mengatasi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum yang merusak kepercayaan publik.

6. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia:

1. Melindungi dan menghormati hak asasi manusia sebagai dasar dari kehidupan demokratis.
2. Menghargai kebebasan berekspresi, beragama, berkumpul, dan berpendapat.

3. Hubungan Budaya Politik Pancasila dengan Konsolidasi Demokrasi

Budaya politik Pancasila memiliki peran penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menyediakan kerangka normatif yang mendukung pengembangan dan pemantapan sistem demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa hubungan utama antara budaya politik Pancasila dan konsolidasi demokrasi:

1. Penghormatan terhadap Keberagaman:

1. Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mendorong penghormatan terhadap keberagaman agama, budaya, dan etnis. Ini penting untuk menciptakan suasana toleransi dan inklusivitas, yang merupakan fondasi bagi konsolidasi demokrasi.
2. Keberagaman yang dihargai dan dilindungi mencegah konflik sektarian dan mendukung koeksistensi damai.

2. Keadilan dan Kemanusiaan:

1. Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mendorong perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini membantu mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi.
2. Penerapan nilai-nilai ini memastikan bahwa semua warga negara merasa dihargai dan dilindungi dalam sistem demokrasi.

3. Persatuan dan Integritas Nasional:

1. Persatuan Indonesia mengedepankan pentingnya menjaga kesatuan dan integritas nasional dalam keragaman. Ini mengurangi risiko fragmentasi politik dan sosial yang dapat mengancam konsolidasi demokrasi.
2. Kesatuan yang kuat mendukung platform bersama bagi partisipasi politik yang inklusif dan merata.

4. Demokrasi Deliberatif:

1. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya demokrasi deliberatif dan partisipatif. Proses musyawarah mufakat yang diusung oleh Pancasila mempromosikan dialog dan kompromi.
2. Ini memungkinkan berbagai kepentingan dan suara didengar dan diakomodasi, sehingga mengurangi potensi konflik politik dan meningkatkan stabilitas demokrasi.

5. Pemerataan Kesejahteraan:

1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mendorong pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat menjadi sumber ketidakstabilan politik.
2. Pemerataan kesejahteraan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mendukung stabilitas politik jangka panjang.

4. Tantangan dalam Implementasi Budaya Politik Pancasila

Meskipun budaya politik Pancasila memiliki potensi besar dalam mendukung konsolidasi demokrasi, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan-tantangan berikut seringkali muncul dalam upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik dan sosial:

1. Korupsi dan Nepotisme:

1. Korupsi dan nepotisme masih menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Hal ini menghambat penerapan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial yang diusung oleh Pancasila.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial:

1. Ketimpangan yang tinggi antara berbagai lapisan masyarakat dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Hal ini menantang implementasi nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.Radikalisme dan Intoleransi:

1. Munculnya radikalisme dan intoleransi dalam masyarakat dapat mengancam keberagaman dan persatuan nasional. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia.

4.Keterbatasan Partisipasi Publik:

1. Partisipasi publik yang rendah dalam proses politik dapat menghambat demokrasi deliberatif dan partisipatif. Ini menantang nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

5.Penegakan Hukum yang Lemah:

1. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak adil merusak supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Hal ini menghambat penerapan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Definisi budaya politik Pancasila dan konsolidasi demokrasi saling terkait dalam konteks upaya mewujudkan sistem politik yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Budaya politik Pancasila, dengan kelima nilai dasar yang diusungnya, menyediakan landasan normatif yang mendukung pengembangan dan pemantapan sistem demokrasi yang inklusif, adil, dan stabil. Namun, tantangan dalam implementasi menunjukkan bahwa upaya yang berkelanjutan dan komprehensif diperlukan untuk mewujudkan potensi penuh dari budaya politik Pancasila dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo, B., Pudjiastuti, S. R., & Sutisna, M. (2021). Pemahaman Siswa tentang Budaya Politik dan Kesadaran Berdemokrasi dengan Komitmen Berakhlakul Kharimah. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 51-56.
- Fikri, S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 18(2), 167-181.
- Culla, A. S. (2005). Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia. *Sociae Polites*, 5(23), 68-79.
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117-124.
- Saleh, K., & Munif, A. (2015). Membangun karakter budaya politik dalam berdemokrasi. *Addin*, 9(2).
- Rinenggo, A. (2022). Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia. *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 10(01), 1-10.
- Pane, I., & Hsb, M. O. (2024). Politik Dinasti Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 13-24.
- Odi, R. (2023). PENGARUH LITERASI POLITIK TERHADAP BUDAYA POLITIK PARTISIPAN MAHASISWA PPKN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Mujani, S. (2017). Konsolidasi Demokrasi Asia: Sebuah Tes Model Ekonomi Politik.
- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215-222.
- Kurniawan, F., & Parella, K. A. (2018). Sociopreneurship masyarakat gusuran dalam membangun konsep kampung wisata tematik topeng malangan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 35-48.
- Kurniawan, F. (2020). *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis* (Vol. 3). G4 Publishing.
- Kurniawan, F., & Soenaryo, S. F. (2019). Menaksir kesetaraan gender dalam profesi ojek online perempuan di kota Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol, 4(2).

- Setiawan, H., & Kurniawan, F. (2017). Pengobatan tradisional sebuah kajian interaksionisme simbolik. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 23(2), 57-66.
- Susilo, R. K. D., Dharmawan, A. S., & Kurniawan, F. (2021). Accept or against the change: The adaptation of the lor brantas society towards the development of Batu City. *Folia Geographica*, 63(1), 143.
- Kurniawan, F., & Kusumaningtyas, Y. (2022). Patriarkhisme Dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Socia Logica*, 1(1), 42-52.
- Saffanah, W. M., & Kurniawan, F. (2020). Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang dengan Menjadi Buruh Bangunan. *ARISTO*, 9(1), 109-130.
- Kurniawan, F. (2022). Stunting dan Stigma Masyarakat, Studi Etnografis Penanganan Stunting pada Masyarakat Kabupaten Malang. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28(4), 56-68.
- Kurniawan, F. (2019). Lejong Tau, A Diorama of Conflict Resolution Based on Local Wisdom. *Jurnal Partisipatoris*, 1(1), 28-35.
- Kurniawan, F. (2024). STUNTING, COVID-19, DAN LOCAL KNOWLEDGE STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ARJOWINANGUN KOTA MALANG. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 21-30.
- Purwasih, J. H. G., Meiji, N. H. P., Kurniawan, F., Dharmawan, A. S., & Sugiharto, M. A. (2021). Penguatan Konservasi dan Literasi Kelompok Grassroot di Kota Batu. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 58-63.